

Akselerasi Pembangunan Inovasi Digital Melalui *Government Hub* Di Kabupaten Sumbawa

Joni Firmansyah¹, Reza Muhammad Rizqi², Rachmat Wasqita³, I Made Widiarta⁴, Ahmad Juliansyah⁵

^{1,2,4,5} Universitas Teknologi Sumbawa-¹firmansyah@gmail.com

-²rezamuhhammad@gmail.com

-⁴widiarta@gmailcom

-⁵juliansyah@gmail.com

³ STKIP Paracendekia NW Sumbawa-³wasqita@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini membahas akselerasi pembangunan inovasi digital melalui inisiatif Government Hub di Kabupaten Sumbawa, bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi digital dalam pemerintahan dan masyarakat. Government Hub dirancang sebagai platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Simple Research Design (SRD) dan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan akan strategi pembangunan berkelanjutan serta peran pemangku kepentingan yang jelas. Analisis menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Implementasi Government Hub diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintah hingga 40%, mempercepat layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Roadmap inovasi jangka panjang (2025-2035) diusulkan untuk membangun fondasi, mengimplementasikan, mengintegrasikan, mengoptimalkan, dan mematangkan Government Hub, dengan inisiatif seperti "One Officer One Innovation" dan kerjasama antar daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Government Hub memiliki potensi besar sebagai katalisator utama pembangunan berkelanjutan di Sumbawa, dengan rekomendasi penguatan kelembagaan, investasi SDM, kebijakan inovatif, dan kolaborasi aktif

Kata Kunci — *Government Hub, Inovasi Digital, Transformasi Digital, Kabupaten Sumbawa, Pembangunan Berkelanjutan, E-Government.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, kemampuan pemerintah untuk mengadopsi teknologi menjadi faktor kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan inovatif. Transformasi digital tidak hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah. Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor ekonomi, budaya, dan pariwisata, menyadari pentingnya akselerasi pembangunan inovasi digital. Untuk menjawab tantangan ini, pengembangan Government Hub menjadi salah satu solusi strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan dan inovasi digital di wilayah ini.

Government Hub adalah sebuah platform kolaborasi yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik (Sari, 2021). Kehadiran platform ini tidak hanya sekadar solusi teknologi, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengoptimalkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan keterhubungan antar lembaga. Dalam konteks ini, pengembangan Government Hub sangat relevan untuk menjawab tuntutan era digital yang

semakin kompleks dan dinamis.

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan transparan. Berdasarkan survei oleh Kurniasih dan Nugroho (2022), sekitar 75% masyarakat di daerah mengharapkan layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring, terutama untuk layanan administrasi dan perizinan. Hal ini relevan dengan kebutuhan di Kabupaten Sumbawa, di mana masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) seringkali menghadapi kendala dalam mengakses layanan publik yang efisien. Kehadiran Government Hub diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui layanan berbasis teknologi yang terintegrasi.

Salah satu manfaat utama dari pengembangan Government Hub adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan. Menurut Rahman (2021), digitalisasi memungkinkan pengelolaan administrasi yang lebih terstruktur, pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat, dan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif. Misalnya, sistem perizinan daring yang terintegrasi dalam Government Hub dapat memangkas waktu pengurusan dokumen dari beberapa minggu menjadi hanya beberapa hari. Efisiensi semacam ini sangat penting untuk mendukung produktivitas pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih dari itu, akselerasi pembangunan digital melalui Government Hub dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pariwisata dan UMKM. Dengan adanya layanan digital yang terintegrasi, para pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, platform pemasaran digital yang terintegrasi dalam Government Hub dapat membantu UMKM mempromosikan produk lokal, seperti tenun Sumbawa dan olahan makanan khas, ke pasar global. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat memanfaatkan layanan ini untuk meningkatkan promosi destinasi wisata unggulan, seperti Pantai Maluk dan Pulau Moyo.

Transformasi pelayanan publik juga menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan Government Hub. Menurut Putri (2021), layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, kesehatan, hingga pendidikan dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat melalui platform ini. Misalnya, masyarakat tidak lagi perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) atau akta kelahiran, karena semua proses dapat dilakukan secara daring. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek penting lainnya yang diharapkan dapat ditingkatkan melalui pengembangan Government Hub. Salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan adalah kurangnya keterbukaan informasi, yang seringkali memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan platform digital yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik, seperti anggaran pemerintah, laporan keuangan, dan progres proyek pembangunan (Zulkarnain, 2020). Keterbukaan semacam ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Keberhasilan pengembangan Government Hub sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar untuk mengembangkan infrastruktur digital yang memadai. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam memperkuat jaringan internet. Hal ini sangat penting, terutama di wilayah perdesaan, yang sering kali menghadapi kendala aksesibilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Putra (2024), menemukan bahwa masyarakat di daerah terpencil mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam program-program pemerintah. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan infrastruktur digital di daerah ini tidak hanya akan meningkatkan akses internet, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Mereka dapat mengakses informasi, menyampaikan keluhan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan yang lebih transparan. Menurut Lestari (2023), penguatan infrastruktur digital sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat menikmati manfaat dari inovasi ini. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki jaringan internet dan infrastruktur digital di Kabupaten Sumbawa harus menjadi prioritas. Hal ini tidak hanya akan membantu mengatasi masalah aksesibilitas, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sebagai sebuah inisiatif strategis, pengembangan Government Hub memerlukan dukungan kebijakan yang terarah dan komprehensif untuk menjamin keberhasilannya. Regulasi terkait keamanan data menjadi salah satu pilar utama, mengingat semakin meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi di era digital. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah perlindungan privasi masyarakat, pengelolaan data yang transparan, dan mitigasi ancaman siber (Sudirman dan Saidin, 2022). Selain itu, standar pelayanan digital perlu dirumuskan secara jelas untuk memastikan keseragaman kualitas layanan di seluruh sektor pemerintahan. Standar ini akan menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi, platform, dan infrastruktur digital, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efisien dan efektif.

Tidak hanya itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi elemen krusial dalam implementasi Government Hub. ASN yang kompeten dalam penggunaan teknologi akan menjadi motor penggerak transformasi digital di berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut Erlinnawati dan Purwanto (2024), pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif, mencakup penguasaan perangkat digital, analisis data, hingga pengelolaan risiko teknologi. Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelatihan ini juga bertujuan untuk membangun mindset inovatif di kalangan ASN, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan masyarakat yang dinamis. Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan Government Hub dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi digital di Kabupaten Sumbawa.

Transformasi digital dalam pemerintahan telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di berbagai negara. Penelitian oleh Sofianto (2019) menyoroti bahwa implementasi teknologi digital dapat mempermudah proses administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat transparansi dalam pemerintahan. Teknologi digital memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara instansi pemerintah, sehingga menghasilkan layanan yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Barsei dkk., 2023). Dalam hal ini, digitalisasi bukan hanya sekadar alat, tetapi juga strategi untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Laporan dari World Bank (2022) memperkuat temuan tersebut dengan mengungkapkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan hingga 40% dan mengurangi biaya operasional sebesar 30%. Efisiensi ini terjadi karena penggunaan teknologi dapat mengeliminasi proses manual yang memakan waktu dan biaya, seperti pengelolaan dokumen secara fisik atau koordinasi lintas instansi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Menurut Rachmad dkk. (2024), dengan adopsi teknologi digital, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, baik itu dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, untuk fokus pada upaya pembangunan lainnya. Hasil ini menjadi bukti konkret bahwa investasi dalam teknologi informasi merupakan langkah strategis yang memberikan manfaat jangka panjang.

Survei oleh United Nations (2022) juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik terhadap pelayanan publik. Hal ini terjadi karena teknologi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan. Contohnya adalah implementasi portal pelayanan publik online yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen seperti KTP, SIM, atau izin usaha tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara langsung. Selain meningkatkan kepuasan masyarakat, adopsi teknologi juga mendorong partisipasi publik dalam pemerintahan, misalnya melalui aplikasi e-participation yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, atau keluhan secara langsung kepada

pemerintah (Prakosa & Rindiana, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang modern dan inklusif.

Sebagai kesimpulan, pembangunan Government Hub di Kabupaten Sumbawa bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sebuah keharusan strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Platform ini memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan berbagai layanan digital yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Dengan Government Hub, Sumbawa memiliki potensi untuk mempercepat transformasi digital, memberikan layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Keberadaan Government Hub juga akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dengan memfasilitasi UMKM dan sektor pariwisata untuk mengakses teknologi dan memperluas jangkauan pasar. Dengan infrastruktur digital yang memadai dan kebijakan yang mendukung, platform ini dapat mendorong Kabupaten Sumbawa untuk menjadi pusat inovasi digital di wilayahnya. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Government Hub dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi Sumbawa sebagai daerah yang unggul, maju, dan sejahtera. Transformasi digital yang dikelola dengan baik melalui Government Hub tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan Simple Research Design (SRD). SRD adalah skema yang menekankan studi literatur yang ketat dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu-isu kompleks secara terfokus dan dapat menghasilkan temuan berkualitas tinggi jika dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini akan memanfaatkan tinjauan literatur yang mendalam, wawancara berkualitas (in-depth interview), transkrip yang lengkap, dan data sekunder yang kredibel. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi subjek secara langsung dan memahami pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta konteks, situasi, dan fenomena alami yang diteliti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali dan memahami kondisi konteks secara rinci, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas di lapangan.

Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau studi literatur. Data primer didapatkan dari narasumber kunci (key informan) seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa (analisis peluang dan tantangan teknologi), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa (perencanaan dan evaluasi program inovasi), beberapa Kepala Desa dan Akademisi di Kabupaten Sumbawa (upaya ekosistem inovasi lokal), serta perwakilan dari Sektor Swasta dan Komunitas Teknologi (kolaborasi pemerintah dan swasta dalam inovasi digital). Data sekunder, yang melengkapi data primer, meliputi studi literatur, laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan data statistik terkait perkembangan inovasi digital di Kabupaten Sumbawa. Tahap pengumpulan data menggunakan skema SRD yang melalui lima langkah: merumuskan konteks sosial dan rumusan masalah, studi literatur untuk membangun dasar pengetahuan, menentukan metode penelitian dan teknik pengumpulan data dari informan kunci, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan tema, serta penyusunan laporan akhir yang menyajikan temuan dan rekomendasi.

Analisis data penelitian melibatkan tiga tahapan utama: pengumpulan data (data collection) dari informan kunci, studi kepustakaan, dan dokumen terkait, yang kemudian diinterpretasikan dan dipilah. Kedua, reduksi data/fokus (data reduction), di mana data difilter dan disortir sesuai kebutuhan penelitian secara sirkuler dan konsisten untuk mengkategorikan data. Ketiga, seleksi

data (data selection/display), di mana data yang telah direduksi siap disajikan secara lebih rinci untuk penarikan kesimpulan dan direkonstruksi untuk menentukan fokus pembahasan.

Alat analisis utama yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk mengevaluasi program percepatan Government Hub. Model CIPP menilai konteks (lingkungan program, tujuan, masalah, kebutuhan, sumber daya, peluang), input (sumber daya seperti anggaran, personel, fasilitas), proses (strategi, aktivitas, interaksi implementasi), dan produk (hasil yang dicapai program, efektivitas, dampak). Untuk memetakan indikator, perangkat lunak NVIVO digunakan untuk organisasi, klasifikasi, dan visualisasi data. Selain itu, analisis strategi pembangunan berkelanjutan melalui Government Hub sebagai alat inovasi dilakukan dengan pendekatan sistem dinamik, yang merupakan metodologi kualitatif-kuantitatif untuk memahami masalah kompleks dan hubungan sebab-akibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis secara mendalam pengembangan Government Hub di Kabupaten Sumbawa, yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui optimalisasi teknologi informasi. Pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk menilai program secara komprehensif, sementara analisis sistem dinamik diterapkan untuk memahami interaksi kausal antar variabel dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Pengumpulan dan interpretasi data kualitatif dilakukan melalui Simple Research Design (SRD), mencakup studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen, dengan fokus pada perumusan indikator Government Hub, strategi pembangunan berkelanjutan, dan pemetaan peran pemangku kepentingan. Pendekatan analitis multifaset ini menegaskan bahwa implementasi Government Hub merupakan transformasi sosio-teknis yang kompleks, membutuhkan evaluasi berkelanjutan, pemahaman dinamika sistem, serta strategi adaptif yang selaras dengan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan unik Sumbawa, meskipun perlu eksplorasi lebih lanjut mengenai mitigasi resistensi terhadap perubahan melalui pelatihan spesifik.

A. Akselerasi Inovasi Melalui Government Hub

Pembentukan Government Hub adalah strategi utama untuk mempercepat inovasi, berdasarkan evaluasi ekosistem inovasi daerah saat ini menggunakan pendekatan CIPP.

1) Context Evaluation (Evaluasi Konteks)

Evaluasi konteks mengidentifikasi kondisi, masalah, dan peluang di Kabupaten Sumbawa yang melatarbelakangi kebutuhan Government Hub.

- a) Goals: Tujuan strategisnya adalah mengakselerasi pembangunan inovasi digital, mengintegrasikan layanan pemerintah, meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan konektivitas antar lembaga, untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. Digitalisasi dianggap penting karena tuntutan reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Beneficiaries: Manfaat akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbawa, termasuk UMKM, dan aparatur pemerintah daerah yang akan mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja.
- c) Needs: Kebutuhan mendesak mencakup layanan pemerintah yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan (75% masyarakat menginginkan layanan daring), dukungan konkret bagi UMKM, infrastruktur digital merata hingga perdesaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
- d) Resources: Sumbawa memiliki sumber daya potensial signifikan seperti sektor pariwisata (Hiu Paus, Pulau Moyo) dan UMKM (tenun, produk olahan khas). Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan akademisi juga menjadi sumber daya non-fisik krusial.

- e) Problems: Tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital antara perkotaan dan perdesaan, kendala UMKM dalam mengakses layanan efisien, kurangnya keterbukaan informasi yang memicu ketidakpercayaan publik, serta tantangan umum seperti birokrasi kaku, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan sumber daya.
- f) Environment: Lingkungan strategis Sumbawa adalah era tuntutan digitalisasi massif, potensi ekonomi lokal belum tergarap optimal, dan dinamika geografis yang mempengaruhi pemerataan infrastruktur, menuntut solusi digital seperti telemedicine dan pendidikan daring.

2) Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Evaluasi masukan dalam implementasi Government Hub di Kabupaten Sumbawa menilai kesiapan sumber daya dan rencana strategis, menggariskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berbasis data untuk mengoptimalkan kinerja daerah. Model Government Hub digambarkan sebagai siklus kebijakan publik yang berkesinambungan, dimulai dari identifikasi kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, kepala desa, OPD, swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat umum) untuk memastikan kebijakan inklusif. Selanjutnya, penyusunan anggaran (budget) ditekankan pada transparansi dan akuntabilitas fiskal, mendorong penyesuaian anggaran berbasis kebutuhan riil pemangku kepentingan dan kemitraan pendanaan. Tahap cakupan kebijakan (coverage) menitikberatkan pada pemerataan jangkauan program di wilayah geografis Sumbawa yang beragam, memanfaatkan pemetaan spasial dan data digital untuk pengukuran keberhasilan yang adil. Strategi pembangunan daerah (strategies) harus mengedepankan inovasi, ketahanan lokal, dan keberlanjutan, didukung oleh riset dan data yang kuat. Tahap riset (research) menekankan pengumpulan dan analisis data sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan, mendorong pembangunan data governance yang kuat. Terakhir, penyusunan rencana aksi (plans) harus mensintesis semua tahapan sebelumnya, mencerminkan kebutuhan masyarakat, didukung anggaran, jangkauan luas, strategi konkret, dan riset mutakhir, serta memungkinkan perencanaan kolaboratif melalui forum partisipatif. Secara keseluruhan, model Government Hub merupakan pendekatan sistemik yang adaptif dan terintegrasi untuk reformasi pemerintahan daerah di Sumbawa.

Gambar 1 Analisis System Dynamic untuk Evaluasi masukan



Hasil analisis peneliti melalui pendekatan Sistem Dinamik:

- a) Plans: Diperlukan Rencana Aksi Daerah (RAD) detail transformasi digital sebagai peta jalan implementasi Government Hub.
- b) Stakeholders: Keterlibatan pemangku kepentingan sangat vital; pemerintah daerah (Diskominfo, Bappeda) sebagai motor penggerak, swasta dan komunitas teknologi untuk kolaborasi teknis dan investasi, serta akademisi dan kepala desa untuk memastikan inovasi

menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kepala desa mengharapkan keterlibatan sejak awal perencanaan.

- c) Strategies: Strategi utama adalah pengembangan platform Government Hub yang terintegrasi, user-friendly, dan aman, didukung penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM (ASN dan masyarakat), serta regulasi perlindungan data.
- d) Budget: Anggaran perlu dialokasikan multi-tahun untuk pembangunan platform, operasional, pemeliharaan, pelatihan berkelanjutan, dan sosialisasi. Sumber pendanaan dapat dieksplorasi melalui APBD, kerjasama pusat, dan CSR.
- e) Coverage: Cakupan layanan Government Hub harus bertahap, dimulai dari layanan administrasi dasar (KTP, KK, izin usaha mikro), lalu diperluas ke sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pertanian secara terintegrasi.
- f) Research: Budaya riset perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan universitas lokal dan lembaga seperti BRIDA untuk menghasilkan kajian berbasis bukti yang mendasari pengembangan fitur dan layanan Government Hub.

3) Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses implementasi Government Hub di Kabupaten Sumbawa fokus pada bagaimana program ini akan dilaksanakan, dipantau, dan disesuaikan, dengan Government Hub sebagai platform kolaborasi sentral untuk analisis inovasi dan mendorong kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Meskipun rencana strategis melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mencakup pengembangan platform, layanan digital, kebijakan pendukung, serta peningkatan kapasitas ASN, analisis menunjukkan potensi ketidakselarasannya antara ambisi digitalisasi dan realitas infrastruktur serta kapasitas SDM di tingkat akar rumput. Risiko kesenjangan digital dapat terjadi jika upaya mitigasi, seperti program literasi digital massal dan penyediaan akses internet komunal, tidak diintegrasikan. Selain itu, meskipun kolaborasi ditekankan, penelitian belum merinci mekanisme tata kelola yang kuat untuk memastikan sinergi yang efektif dan penerjemahan kontribusi pemangku kepentingan menjadi tindakan konkret. Analisis masukan juga perlu mempertimbangkan investasi awal yang substansial untuk infrastruktur dan pelatihan, bukan hanya efisiensi jangka panjang, guna menghindari risiko terhentinya proyek atau kualitas suboptimal.

- a) Actions: Tindakan konkret dimulai dengan pembentukan tim kerja lintas-OPD, FGD dengan pemangku kepentingan untuk memetakan kebutuhan, dan memulai pengembangan prototipe platform.
- b) Develop: Pengembangan platform menggunakan pendekatan agile, iteratif berdasarkan umpan balik pengguna untuk memastikan produk akhir sesuai kebutuhan.
- c) Implement: Implementasi bertahap (pilot project) di beberapa desa/kecamatan untuk pengujian sistem sebelum peluncuran ke seluruh kabupaten. Sosialisasi masif melalui berbagai kanal media adalah kunci keberhasilan adopsi.
- d) Monitor: Monitoring dilakukan real-time melalui dasbor analitik di Government Hub untuk memantau penggunaan layanan, waktu respons, dan tingkat kepuasan. Evaluasi berkala (triwulan dan tahunan) mengukur pencapaian target.
- e) Feedback: Government Hub harus memiliki fitur umpan balik yang mudah diakses. Setiap masukan dari masyarakat, keluhan atau saran, harus ditindaklanjuti secara transparan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membangun kepercayaan publik.

Analisis SWOT menunjukkan kekuatan (komitmen Pemda, potensi ekonomi, kajian awal), kelemahan (kesenjangan infrastruktur, kapasitas ASN, resistensi birokrasi, ketergantungan anggaran), peluang (peningkatan kualitas layanan, pertumbuhan ekonomi digital, partisipasi masyarakat, model percontohan, dukungan pusat), danancaman (keamanan siber, perubahan teknologi cepat, ketidakpastian regulasi, kesenjangan digital, keberlanjutan pendanaan). Analisis ini menjadi dasar perumusan strategi terfokus dan antisipatif.

4) Product Evaluation (Evaluasi Produk)

Evaluasi produk atau hasil akhir implementasi Government Hub adalah tahap krusial dalam model CIPP, memproyeksikan dampak, menilai efektivitas, mempertimbangkan transferabilitas, dan merumuskan strategi keberlanjutan serta penyesuaian.

- a) Impact: Implementasi Government Hub di Sumbawa diproyeksikan memiliki dampak multidimensional signifikan. Tata kelola pemerintahan diharapkan meningkatkan efisiensi operasional hingga 40%, transparansi, dan akuntabilitas. Bagi masyarakat, manfaat utama adalah layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, responsif, dan keterlibatan kuat dalam pengambilan kebijakan. Dari perspektif ekonomi, Government Hub diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memfasilitasi UMKM dan pariwisata memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Jangka panjang, diharapkan tercipta ekosistem digital matang di Sumbawa yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan IPM, dan daya saing daerah. Inisiatif ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis untuk kemajuan daerah.
- b) Effectiveness: Ketersediaan infrastruktur digital yang memadai dan merata adalah prasyarat utama. Kualitas SDM TIK yang kompeten (ASN dan pengguna), kerangka regulasi dan kebijakan pendukung (perlindungan data, standar layanan digital), serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dan mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadi faktor penentu efektivitas. Efektivitas diukur dengan indikator kunci: penurunan waktu dan biaya layanan publik (misal, izin usaha dari minggu menjadi hari); peningkatan jumlah UMKM go-digital; peningkatan kunjungan wisatawan melalui promosi digital; dan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah digital.
- c) Transportability: Model Government Hub Sumbawa yang berhasil dapat direplikasi dan diadaptasi oleh kabupaten/kota lain di NTB atau nasional, menjadi praktik terbaik. Hasil penelitian dan pengalaman praktis Sumbawa diharapkan menjadi model atau referensi berharga bagi daerah lain dengan aspirasi serupa.
- d) Sustainability & Adjustment: Keberlanjutan dipastikan melalui tiga pilar: (1) Keberlanjutan Finansial (model anggaran jelas); (2) Keberlanjutan Institusional (unit kerja permanen); dan (3) Keberlanjutan Teknologi (pembaruan sistem berkala). Penyesuaian terus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Strategi keberlanjutan mencakup penguatan infrastruktur digital, dukungan kebijakan yang kuat, program peningkatan kapasitas ASN berkelanjutan, kolaborasi erat, dan pembentukan mindset inovatif.

B. Analisis Proses Implementasi, Tata Kelola, dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Evaluasi proses dalam model CIPP berfokus pada bagaimana Government Hub akan dikembangkan, diimplementasikan, dipantau, dan bagaimana mekanisme umpan balik dikelola. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi potensi kendala pelaksanaan dan memastikan proses berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini relevan untuk Sumbawa yang bertransisi dari birokrasi tradisional menuju tata kelola berbasis data, inovasi, dan kolaborasi multi-stakeholder. Dalam konteks daerah dengan keberagaman geografis, sosial-budaya, dan kebutuhan digitalisasi mendesak, Government Hub Development menyediakan cetak biru strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan responsif dan adaptif.

Gambar 2 Proses Implementasi *Government Hub*

- a) Action Planning: Perencanaan aksi menjadi pondasi, perlu memperhatikan data mikro berbasis desa, tren digital, aspirasi lintas generasi, serta masukan komunitas sipil dan pelaku ekonomi lokal. Perencanaan harus mengintegrasikan teknologi, partisipasi warga, dan skema kolaboratif antar pemerintah desa, kabupaten, dan mitra pembangunan.
- b) Development: Merujuk pada pembangunan sistem, kapasitas, dan struktur yang diperlukan untuk mewujudkan rencana aksi. Tantangan utama di Sumbawa adalah keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas SDM, dan kapasitas fiskal. Pembangunan mencakup sistem digital, pelatihan SDM, dan peraturan pendukung. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal penting dalam membangun SDM digital.
- c) Implementation: Pelaksanaan program sering menghadapi kendala koordinasi antar OPD, pengawasan lemah, dan kurangnya fleksibilitas anggaran. Implementasi harus simultan dengan komunikasi publik yang baik, pelibatan pemuda, dan kemitraan swasta. Implementasi efektif memerlukan kejelasan tugas antar instansi, pembagian peran, dan keberanian dalam inovasi birokrasi.
- d) Monitoring: Kerap diabaikan dalam siklus kebijakan tradisional, sering sebatas laporan fisik dan keuangan. Pendekatan Government Hub menekankan monitoring dinamis, berbasis indikator kinerja, dan melibatkan aktor non-pemerintah. Sistem monitoring berbasis komunitas dapat memberikan umpan balik langsung dari lapangan, mendorong transparansi dan akuntabilitas.
- e) Feedback: Umpan balik adalah dasar penyempurnaan perencanaan. Budaya umpan balik masyarakat masih terbatas akibat kesenjangan informasi dan budaya birokrasi yang belum terbuka. Sistem Government Hub harus dilengkapi mekanisme umpan balik yang mudah diakses, aman, dan responsif. Umpan balik perlu disampaikan sistematis ke dokumen perencanaan agar perbaikan berjalan berkelanjutan.

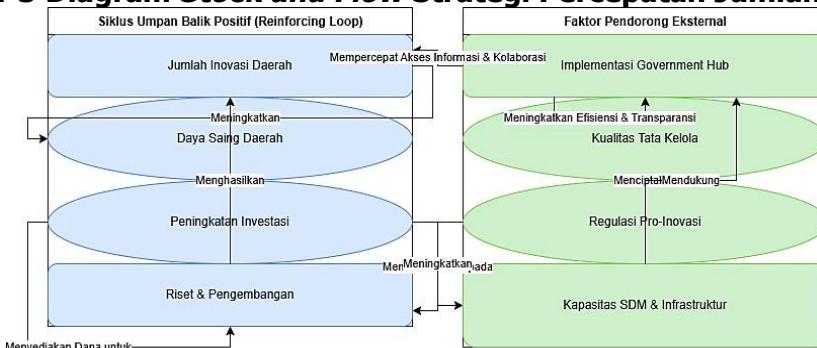
Implementasi Government Hub di Kabupaten Sumbawa dirancang sebagai siklus lima tahap yang komprehensif: diawali dengan Perencanaan Tindakan (Actions) meliputi adopsi platform digital dan pengembangan e-partisipasi; diikuti Proses Pengembangan (Develop) yang berfokus pada platform terintegrasi, user-friendly, serta mengutamakan keamanan data dan pemanfaatan big data. Tahap Implementasi (Implement) menekankan pembinaan budaya inovasi, pelibatan pemangku kepentingan, kebijakan pendukung, dan pelatihan ASN komprehensif, dengan keberhasilan bergantung pada manajemen perubahan yang efektif. Selanjutnya, Aspek Pemantauan (Monitor) melibatkan Bappeda dan penggunaan NVivo untuk sistem M&E yang terintegrasi. Terakhir, Mekanisme Umpan Balik (Feedback) memungkinkan masukan publik dan menekankan siklus umpan balik tertutup untuk membangun kepercayaan dan partisipasi berkelanjutan. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan Government Hub Sumbawa tidak hanya terletak pada teknologi, melainkan pada kemampuan mengelola perubahan, partisipasi aktif, dan sistem evaluasi adaptif, yang secara sistemik memperkuat tata kelola daerah dan mendorong keterlibatan masyarakat, meskipun memerlukan kemauan politik, kolaborasi,

peningkatan literasi digital, dan investasi.

C. Analisis Sistem Dinamik: Proyeksi Percepatan Inovasi

Pendekatan Sistem Dinamik digunakan untuk memvisualisasikan dampak Government Hub, memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang kompleks antar faktor-faktor yang memengaruhi inovasi daerah. Bagan yang relevan untuk Sumbawa ini menggambarkan hubungan dinamis antara berbagai penggerak inovasi daerah dengan Government Hub. Analisis ini menguraikan bagaimana integrasi faktor internal dan eksternal membentuk lingkaran umpan balik positif (reinforcing loop) yang mendorong pertumbuhan inovasi, memperkuat daya saing, dan mempercepat pembangunan digital serta kolaboratif.

Gambar 3 Diagram Stock and Flow Strategi Percepatan Jumlah Inovasi



Bagian awal diagram menunjukkan siklus umpan balik positif (reinforcing loop) yang dimulai dengan peningkatan inovasi daerah di Sumbawa, meskipun inovasi saat ini masih terfragmentasi dan belum terdokumentasi sistematis. Peningkatan inovasi ini berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah melalui efisiensi birokrasi, kualitas layanan, keterbukaan informasi, dan responsivitas pemerintah. Daya saing yang lebih tinggi kemudian menarik investasi dari sektor swasta, BUMDes, dan investor digital, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kapasitas Riset & Pengembangan (R&D) sebagai fondasi inovasi berkelanjutan. Siklus ini, di mana R&D menghasilkan lebih banyak inovasi, investasi meningkat, dan daya saing menguat, akan dipercepat oleh Government Hub sebagai katalisator utama. Government Hub secara langsung mempercepat inovasi melalui fasilitasi kolaborasi dan akses informasi, serta secara tidak langsung meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi R&D dan regulasi pro-inovasi. Namun, keberhasilan implementasi Government Hub sangat bergantung pada kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai, mengingat tantangan signifikan di Sumbawa terkait literasi digital, kekosongan jabatan teknis, akses internet yang belum merata, dan keterbatasan perangkat keras. Oleh karena itu, investasi yang substansial pada SDM dan infrastruktur merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan siklus inovasi. Simulasi mengindikasikan bahwa intervensi Government Hub akan menghasilkan akselerasi signifikan dalam pertumbuhan inovasi, investasi, dan daya saing daerah Sumbawa dibandingkan skenario business-as-usual.

1) Menyediakan Indikator Government Hub sebagai Katalisator Inovasi

Agar berfungsi sebagai katalisator, Government Hub di Sumbawa harus dibangun berdasarkan indikator yang jelas. Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi keberhasilan, serta menjawab kebutuhan indikator terukur, berikut draf awal Indikator Kinerja Kunci (IKK):

- Karakteristik Wilayah & Konten Lokal: Platform harus menonjolkan potensi unik Sumbawa (pariwisata, tambang, pertanian, budaya) dengan konten relevan dan menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal. IKK: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diatribusikan pada promosi digital melalui GH (data Dinas Pariwisata, analisis data kunjungan); Peningkatan persentase UMKM di Sumbawa yang melakukan penjualan daring (survei UMKM periodik, data e-commerce).

- b) Regulasi & Tata Kelola: Didukung Peraturan Bupati/Daerah jelas mengenai SPBE, keamanan siber, perlindungan data pribadi. Struktur tata kelola harus jelas, menunjuk OPD bertanggung jawab. IKK: Rasio realisasi anggaran operasional dan pengembangan Government Hub terhadap alokasi (laporan keuangan Pemda); Jumlah sesi kolaborasi/rapat koordinasi antar-OPD difasilitasi GH (laporan kegiatan, notulensi rapat).
 - c) Kolaborasi Aktor (Pentahelix): Platform harus memiliki fitur yang memfasilitasi interaksi Pemerintah, Akademisi, Swasta/Industri, Komunitas, dan Media (contoh: marketplace UMKM, forum diskusi kebijakan, portal lowongan kerja). IKK: Peningkatan persentase UMKM di Sumbawa yang melakukan penjualan daring (hasil kolaborasi) (survei UMKM, data e-commerce); Jumlah sesi kolaborasi/rapat koordinasi antar-OPD difasilitasi GH (laporan kegiatan, notulensi rapat); Jumlah inovasi layanan publik baru diluncurkan hasil kolaborasi GH (laporan inovasi daerah, data Bappeda).
 - d) SDM Pengelola & Pengguna: Diperlukan tim pengelola kompeten (teknis & manajerial). Tingkat literasi digital ASN dan masyarakat menjadi indikator keberhasilan adopsi. IKK: Jumlah ASN yang telah mengikuti dan lulus program pelatihan TIK terkait Government Hub (data BKPSDM/Diskominfo); Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas layanan publik digital keseluruhan (survei IKM reguler).
 - e) Dukungan Anggaran Berkelanjutan: Alokasi anggaran jelas dan multi-tahun dalam APBD untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas. IKK: Rasio realisasi anggaran operasional dan pengembangan Government Hub terhadap alokasi (laporan keuangan Pemda).
 - f) Target/Output Terukur: Memiliki KPI yang jelas: jumlah layanan terintegrasi, waktu proses layanan, jumlah pengguna aktif, tingkat kepuasan, jumlah HKI terdaftar, dll. IKK: Waktu rata-rata penyelesaian layanan perizinan utama melalui platform GH (log Sistem GH); IKM terhadap kualitas layanan publik digital keseluruhan (survei IKM reguler); Jumlah inovasi layanan publik baru diluncurkan hasil kolaborasi GH (laporan inovasi daerah, data Bappeda).
 - g) Infrastruktur & Aksesibilitas: Platform harus dapat diakses andal di seluruh wilayah Sumbawa. Indikatornya uptime server, kecepatan akses, dan ketersediaan internet merata. IKK: Tingkat ketersediaan (uptime) platform Government Hub (log Sistem GH, laporan teknis); Persentase penurunan jumlah keluhan masyarakat terkait akses dan kualitas layanan dasar (survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periodik, data pengaduan).
 - h) Keamanan dan Kepercayaan: Sistem harus diaudit keamanannya berkala untuk melindungi data pengguna dan mencegah serangan siber, membangun kepercayaan publik. IKK: Tingkat ketersediaan (uptime) platform Government Hub (terkait stabilitas dan keamanan) (log Sistem GH, laporan teknis); IKM terhadap kualitas layanan publik digital keseluruhan (termasuk aspek kepercayaan) (survei IKM reguler).
- Draf IKK ini adalah langkah konkret untuk alat ukur yang jelas. Pengelompokan IKK berdasarkan perspektif CIPP memastikan evaluasi komprehensif, mencakup seluruh tahapan program. Keterkaitan IKK dengan tujuan strategis Government Hub (peningkatan kualitas layanan dan pemberdayaan ekonomi UMKM) menunjukkan relevansi dan fokus pada pencapaian hasil nyata. IKK ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih detail dan operasional untuk mengukur keberhasilan program dan penyesuaian strategi berkelanjutan.

2) Menyediakan Indikator Desa Inovatif

Untuk mendorong inovasi dari tingkat akar rumput, perlu disusun Indeks Desa Inovatif (IDI). Desa inovatif krusial sebagai "laboratorium hidup" untuk menguji coba solusi lokal. Indikator IDI dapat mencakup:

- a) Inovasi Layanan Desa (Digitalisasi Administrasi Desa): Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan desa melalui platform seperti DIGIDES (manajemen kependudukan, persuratan, pengelolaan pajak, pemantauan anggaran real-time). Memungkinkan masyarakat mengakses

layanan publik daring, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan partisipasi. Mendukung pengelolaan data akurat, perencanaan pembangunan, akuntabilitas, dan transparansi dana desa.

- b) Inovasi Ekonomi (Digitalisasi UMKM dan Produk Unggulan Desa): Membuka peluang bagi UMKM desa bersaing global melalui e-commerce dan media sosial. Pelatihan digital, pendampingan pemasaran online, dan integrasi sistem informasi desa telah membantu produk lokal menembus pasar digital, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan usaha efisien (pencatatan transaksi otomatis, manajemen inventaris, analisis pasar berbasis data).
- c) Inovasi Sosial & Lingkungan (Program Komunitas dan Energi Terbarukan): Berfokus pada pemberdayaan komunitas dan pelestarian lingkungan. Contohnya program pengelolaan sampah berbasis komunitas (bank sampah) yang mengurangi sampah dan menciptakan peluang ekonomi, serta pemanfaatan energi terbarukan (panel surya). Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan menciptakan desa yang resilient.
- d) Infrastruktur Digital Desa (Akses Internet dan Pemanfaatannya): Penyediaan akses internet luas dan terjangkau, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan TIK. Akses internet baik memungkinkan masyarakat mengakses informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi online. Tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur, literasi digital rendah, dan kurangnya dukungan kebijakan. Diperlukan upaya bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk membangun infrastruktur inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan pelatihan.
- e) Partisipasi & Kolaborasi (Musrenbangdes, BUMDes, dan Kerjasama Eksternal): Partisipasi aktif masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) penting untuk desa demokratis dan berkelanjutan. BUMDes berperan strategis mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan. Kerjasama dengan pihak eksternal (universitas, LSM, swasta) memperkuat kapasitas desa melalui akses sumber daya, teknologi, dan pengetahuan.

Setiap desa akan dinilai berdasarkan indeks ini, dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau program pendampingan khusus.

3) Membangun Komunitas Inovasi-Partisipatif

Government Hub tidak akan optimal tanpa komunitas yang hidup di sekitarnya. Membangun komunitas inovasi yang partisipatif adalah kunci, dengan langkah-langkah:

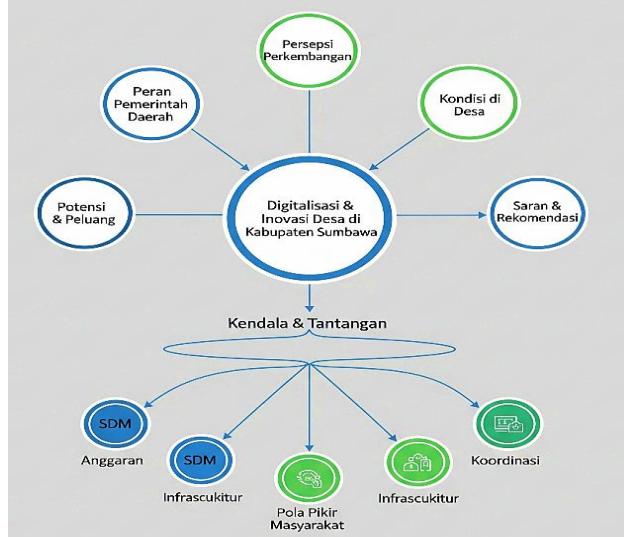
- a) Identifikasi dan Pemetaan: Mengidentifikasi pegiat inovasi lokal, komunitas digital, kelompok pemuda kreatif, dan sanggar budaya di Sumbawa.
- b) Fasilitasi Ruang Kolaborasi: Menyelenggarakan acara rutin seperti hackathon, kompetisi ide, seminar, dan workshop dengan fasilitas pemerintah atau ruang publik, disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- c) Championing: Mengangkat "Duta Inovasi" dari kalangan lokal yang berhasil, menginspirasi lebih banyak orang untuk berinovasi.
- d) Platform Digital Komunitas: Mengintegrasikan forum atau media sosial khusus di dalam Government Hub sebagai wadah untuk berjejaring, berbagi ide, dan berkolaborasi secara virtual.
- e) Kemitraan dengan Sektor Pendidikan: Mengandeng sekolah dan universitas untuk memasukkan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong pemikiran kritis dan inovatif sejak dini.

D. Analisis Tematik Mendalam dari Perspektif Para Pemangku Kepentingan Utama

Keberhasilan implementasi Government Hub di Kabupaten Sumbawa sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai perspektif, harapan, dan kekhawatiran berbagai pemangku

kepentingan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari narasumber kunci seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Kepala Desa, Akademisi, serta perwakilan sektor swasta dan komunitas teknologi, di samping melibatkan masyarakat umum dan pelaku UMKM sebagai pengguna akhir. Analisis tematik data ini, yang difokuskan pada hasil NVivo, menunjukkan bahwa digitalisasi desa merupakan inti dari transformasi pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transparansi tata kelola di Sumbawa. Meskipun terdapat potensi signifikan dalam digitalisasi berkat kekayaan budaya, pariwisata, serta sektor pertanian dan peternakan yang kuat, tantangan utama terletak pada beragamnya persepsi masyarakat dan perangkat desa (antara peluang dan beban), kondisi infrastruktur digital yang belum merata, dan kapasitas SDM operator yang bervariasi, yang semuanya mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan implementasi inovasi digital di desa. Oleh karena itu, isu sentralnya adalah bagaimana mencapai inovasi dan digitalisasi yang merata, efektif, dan berkelanjutan di desa-desa Sumbawa, dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat, kondisi lokal, peran pemerintah daerah, potensi daerah, serta rekomendasi yang muncul.

Gambar 4 Diagram Model Hasil Analisis Nvivo



Analisis NVivo mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara:

- Node 1: Persepsi Terhadap Perkembangan Digitalisasi: Pandangan optimis (perkembangan luar biasa, membantu sistem regulasi, layanan beralih ke aplikasi online, Pemda penting dorong digitalisasi karena tuntutan reformasi birokrasi) dan kritis (perkembangan agak lambat/tertinggal, kurang kolaborasi dengan pelaksanaan pemerintahan, pemanfaatan media promosi daerah kurang kreatif).
- Node 2: Peran dan Upaya Pemerintah Daerah (Pemda): Pemda diakui berperan tapi implementasi belum maksimal/berkelanjutan. Dukungan yang telah diberikan: bantuan pembuatan website desa, pelatihan admin desa, penerapan SID, absensi/pengukuran kinerja digital, mengawal SPBE (indeks 2,9/baik). Keterbatasan: program penghargaan desa inovatif sering seremonial tanpa pendampingan, program hanya formalitas/perubahan nama, peran pemangku kebijakan belum signifikan.
- Node 3: Kondisi dan Inovasi di Tingkat Desa/Kelurahan: Desa dan kelurahan masih tahap awal adopsi digital, inovasi mandiri terbatas. Penerapan digitalisasi saat ini: sebagian besar implementasi program pusat/daerah (aplikasi keuangan desa, SID), papan informasi digital, program Jango Desa DUKCAPIL di Kelurahan Uma Sima. Inovasi mandiri belum terwujud karena kendala anggaran dan SDM. Upaya pelibatan masyarakat: belum ada sosialisasi nyata, sulit karena SDM masyarakat beragam dan menganggap digitalisasi tabu/mempersulit.

- d) Node 4: Kendala dan Tantangan Utama (Hambatan Digitalisasi): Konsensus semua narasumber tentang kendala utama. Anggaran menjadi kendala terkuat (biaya awal/berkelanjutan, pemotongan anggaran). SDM: kurangnya pegawai paham teknologi di desa/kelurahan, aparat belum terbiasa/keliru, SDM kelurahan banyak yang sudah berumur, literasi digital masyarakat rendah. Pola Pikir dan Partisipasi: masyarakat belum siap perubahan/mempertanyakan manfaat, aparat desa antusias sesaat tapi implementasi tidak berjalan, kecenderungan malas memperbarui data. Infrastruktur: belum merata, terutama pelosok/pegunungan. Koordinasi dan Integrasi: aplikasi pusat sering tanpa pelatihan/arahan memadai, tantangan terbesar adalah mengintegrasikan aplikasi inovasi parsial dari berbagai dinas.
- e) Node 5: Potensi dan Peluang Digitalisasi: Potensi besar untuk pengembangan digital di Sumbawa. Potensi SDM: banyak anak muda mengerti digitalisasi, SDM bagus tapi perlu literasi. Potensi Infrastruktur: telekomunikasi umum bagus, perlu dimaksimalkan. Potensi Inovasi: branding desa/daerah, promosi pariwisata via media sosial, sudah ada inovasi penghargaan nasional seperti SIJINAK (perizinan peternakan).
- f) Node 6: Saran dan Rekomendasi: Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital (aparat dan masyarakat). Perbaikan infrastruktur (jaringan internet pelosok). Pendekatan inovasi yang sesuai kondisi/kesiapan masyarakat. Mendorong kerja sama dengan stakeholder (perguruan tinggi, swasta) untuk menutupi keterbatasan Pemda, skema penganggaran inovasi diperhatikan. Inkubasi inovasi yang sudah ada untuk optimalisasi dan pengembangan lebih lanjut.

Analisis tematik mengidentifikasi "kesenjangan persepsi dan ekspektasi" yang krusial antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Government Hub di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah cenderung memprioritaskan efisiensi internal, sedangkan masyarakat dan UMKM lebih mengharapkan kemudahan akses layanan dan dampak langsung pada kesejahteraan. Menjembanai kesenjangan ini penting untuk mencegah resistensi dan memastikan Government Hub memenuhi kebutuhan semua pihak. "Kepercayaan" menjadi fondasi fundamental, mencakup keyakinan masyarakat terhadap keamanan data, UMKM terhadap efektivitas platform, dan antarlembaga pemerintah dalam kolaborasi. Kurangnya keterbukaan informasi dapat memicu ketidakpercayaan, sementara keamanan data adalah pilar utama, dan kolaborasi efektif bergantung pada saling percaya. Oleh karena itu, membangun kepercayaan harus menjadi bagian integral dari strategi implementasi Government Hub. Matriks tematik perspektif pemangku kepentingan menyajikan sintesis terstruktur mengenai aspek-aspek kunci Government Hub, berfungsi sebagai alat bagi pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas sosial dan politik, serta merancang strategi implementasi yang inklusif, responsif, dan berhasil.

E. Government Hub sebagai Langkah Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi Government Hub bukan tujuan akhir, melainkan langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan yang ditopang inovasi, fondasi untuk mewujudkan Smart Regency di Sumbawa.

1) Implikasi Strategis, dan Peluang Inovasi Lanjutan

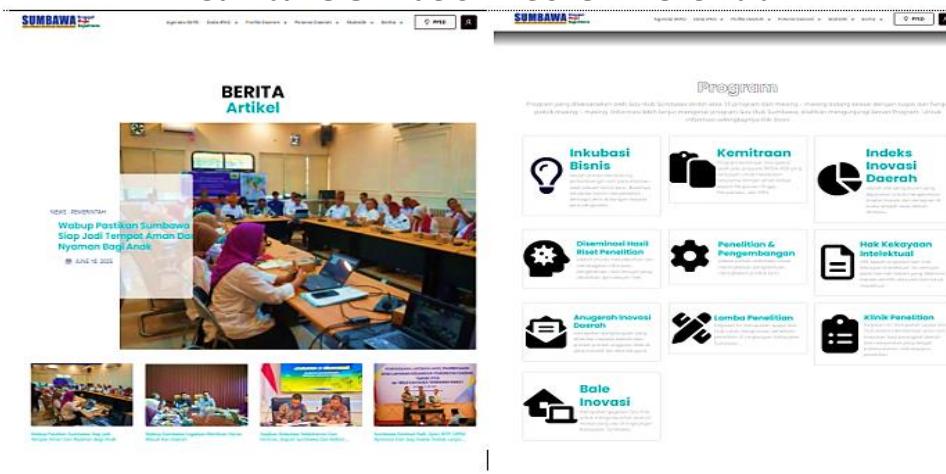
Analisis SWOT, CIPP, dan tematik NVivo mengidentifikasi komitmen politik, potensi ekonomi (UMKM, pariwisata), dan antusiasme kolaborasi sebagai kekuatan pengembangan Government Hub di Kabupaten Sumbawa, namun menyoroti tantangan signifikan seperti kesenjangan infrastruktur digital, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, resistensi birokrasi, dan kompleksitas pengelolaan kolaborasi multipihak. Implikasi strategis menekankan prioritas pelatihan ASN untuk mengatasi kesenjangan kapasitas, penguatan regulasi perlindungan data untuk membangun kepercayaan publik, strategi pemerataan akses digital di perdesaan, serta pembentukan mekanisme tata kelola khusus untuk kolaborasi multipihak yang kompleks. Peluang inovasi lanjutan mencakup integrasi AI, pengembangan platform open data, inisiatif smart village terintegrasi, kerjasama inovasi antar kota/kabupaten, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberhasilan inisiatif ini sangat

bergantung pada faktor kritis seperti kepemimpinan politik yang kuat, kolaborasi sinergis, infrastruktur digital yang handal, kapasitas SDM TIK yang kompeten, partisipasi masyarakat, dan kerangka regulasi yang adaptif. Potensi risiko, termasuk kegagalan adopsi dan keamanan siber, dapat dimitigasi melalui sosialisasi masif, investasi keamanan, skema pendanaan multi-tahun, dan strategi manajemen perubahan komprehensif.

2) Arah Perkembangan Government Hub

Perkembangan Government Hub di Sumbawa menunjukkan urgensi strategis melampaui fungsi portal informasi publik konvensional seperti website sumbawakab.go.id. Government Hub dirancang sebagai platform kolaborasi strategis dan ekosistem inovasi aktif, bukan repositori informasi statis. Tujuannya adalah mengintegrasikan layanan pemerintah yang tersebar, memfasilitasi interaksi dua arah dengan masyarakat, dan mendorong kolaborasi multipihak (Pentahelix). Fokus utama adalah pembangunan ekosistem, dengan sumbawagovhub.id sebagai jantung atau alat utama.

Gambar 5.5. Platform Government Hub



Government Hub (Gov Hub) dirancang untuk menjadi platform inovasi digital yang dinamis dan berbeda dari sistem pasif yang sudah ada, seperti situs web Bappeda, dengan berfokus pada pengolahan data aktif, penelitian dan pengembangan (R&D) untuk solusi baru, serta berfungsi sebagai "bank ide" dan inkubator inisiatif "One Officer One Innovation". Keberhasilan Gov Hub akan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, melacak metrik teknis dan dampak nyata, seperti penurunan waktu penyelesaian izin, peningkatan UMKM go-digital, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik. Arsitekturnya didesain integratif secara vertikal dan horizontal, menghubungkan dan menarik data dari berbagai sistem yang ada, termasuk di tingkat desa/kelurahan, untuk mengatasi masalah silo informasi dan menyediakan dasbor terpusat untuk monitoring dan pengambilan kebijakan yang akurat, serta satu pintu akses layanan bagi masyarakat. Pengelolaan sistem yang kompleks ini akan membutuhkan unit kerja atau tim khusus permanen sebagai manajer ekosistem digital, yang memiliki kapabilitas dalam manajemen kolaborasi, analisis data, kurasi inovasi, dan manajemen perubahan. Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa (sumbawakab.go.id) akan tetap berfungsi sebagai etalase digital dan portal informasi resmi satu arah, melengkapi peran Gov Hub sebagai "dapur inovasi dan ruang kerja kolaboratif", sehingga keduanya menjadi pilar strategi pemerintahan digital yang utuh dan modern alih-alih saling bersaing. Sumbawa Gov Hub lahir dari kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi portal informasi konvensional, urgensinya dari masalah fragmentasi layanan dan minimnya ruang kolaborasi untuk inovasi. Gov Hub dirancang sebagai platform kolaborasi strategis yang dinamis dan interaktif. Kelebihan utamanya terletak pada tiga fungsi inti yang tidak dimiliki sumbawakab.go.id:

- a) Sebagai Integrator Layanan: Berfungsi sebagai single access point yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi publik yang tersebar, termasuk aggregator berita dari kanal media sosial pemerintah.
- b) Sebagai Fasilitator Kolaborasi (Pentahelix): Ruang kerja digital untuk interaksi aktif antara pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta/industri, komunitas, dan media, mengubah paradigma dari melayani menjadi berkolaborasi.
- c) Sebagai Katalisator Inovasi: Pemicu inovasi melalui inisiatif "One Officer One Innovation" sebagai "bank ide" ASN, dan pusat R&D berbasis data untuk solusi nyata dan peningkatan daya saing daerah.

Sumbawagovhub.id berperan sinergis dengan sumbawakab.go.id, mendukung dan memperkuat fungsi yang terakhir sebagai portal informasi resmi, sementara sumbawagovhub.id berfungsi sebagai mesin inovasi dan kolaborasi. Keberhasilan inovasi layanan publik yang dikembangkan di Government Hub dapat diumumkan dan didokumentasikan di sumbawakab.go.id, yang juga dapat mengarahkan masyarakat ke Government Hub untuk layanan terpadu dan partisipasi inovasi. Inisiatif ini melampaui pengembangan website, mewujudkan transformasi sosio-teknis komprehensif yang mencakup pengembangan tata kelola, perumusan kebijakan pendukung, dan program luar jaringan untuk membangun komunitas inovasi partisipatif. Platform digital sumbawagovhub.id merupakan antarmuka dari sistem yang lebih besar yang digariskan dalam peta jalan inovasi jangka panjang hingga 2035, dengan tujuan mengubah budaya pemerintahan menjadi lebih terbuka dan kolaboratif, serta mewujudkan visi Sumbawa sebagai Smart Regency yang unggul dan berkelanjutan.

3) Inisiatif Strategis "One Officer One Innovation"

Inisiatif "One Officer One Innovation" diusulkan sebagai strategi fundamental untuk menumbuhkan budaya inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mendorong setiap pegawai menghasilkan setidaknya satu inovasi per tahun, mencakup ide, perbaikan proses, atau gagasan layanan baru. Implementasi strategi ini melibatkan empat pilar utama: pertama, sosialisasi dan perubahan pola pikir ASN dari pelaksana rutin menjadi pencipta solusi, didukung oleh pelatihan berpikir kreatif, manajemen inovasi, dan design thinking serta melibatkan tokoh inspiratif untuk membangun kepercayaan diri dan meminimalkan ketakutan akan kegagalan. Kedua, penyediaan platform ide dalam Government Hub sebagai "bank ide" untuk menampung gagasan inovatif dari seluruh ASN lintas OPD, memfasilitasi kurasi, kolaborasi, dan pencatatan sistematis. Ketiga, proses penilaian dan apresiasi ide-ide terbaik oleh tim independen (akademisi, praktisi, wakil masyarakat), dengan penghargaan berupa insentif finansial, promosi, atau non-materiil dari kepala daerah setiap tahun. Keempat, inkubasi ide-ide potensial menjadi prototipe yang dapat diimplementasikan, dengan dukungan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi yang berhasil, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, atau sektor swasta untuk pendampingan teknis, akses pembiayaan, dan uji coba terbatas.

4) Kerjasama Inovasi Antar Kota dan Kabupaten

Inovasi tidak boleh terbatas geografis. Sumbawa harus proaktif menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk mempercepat pembelajaran dan adopsi inovasi. Kerjasama ini penting untuk pembangunan berbasis teknologi dan pengetahuan, memperluas cakrawala, dan mempercepat adopsi kebijakan/teknologi efektif. Sumbawa perlu bersikap proaktif dan terbuka menjalin kerjasama inovasi dengan daerah lain, di NTB maupun nasional.

- a) Forum Inovasi Regional: Menginisiasi atau berpartisipasi aktif dalam forum inovasi tingkat provinsi (NTB) untuk berbagi praktik terbaik, tantangan, dan membangun jaringan kepercayaan antar pemimpin daerah/pemangku kepentingan inovasi.
- b) Studi Tiru Terstruktur: Mengirim tim untuk mempelajari implementasi e-government atau smart city di daerah lebih maju (Surabaya, Banyuwangi, Sumedang) dan mengadaptasi solusi relevan.

- c) Joint Project: Mengembangkan proyek inovasi bersama dengan kabupaten tetangga (misalnya, promosi pariwisata terintegrasi atau pengelolaan SDA lintas batas) untuk memperkuat posisi Sumbawa dan memaksimalkan efisiensi anggaran.
- d) Aliansi Smart City: Bergabung dengan jaringan/aliansi kota/kabupaten cerdas di Indonesia untuk akses pengetahuan, teknologi, dan potensi pendanaan, serta benchmarking dan diplomasi antar pemerintah daerah.

5) Menyusun Roadmap Inovasi Kabupaten Sumbawa (2025-2035)

Usulan roadmap inovasi sebagai panduan strategis jangka panjang:

- a) Tahun 1-2 (2025-2026): Fase Fondasi dan Pelembagaan: Pembentukan Tim Kerja Transformasi Digital, penyusunan Perkada tentang SPBE dan Roadmap Inovasi, studi kelayakan dan desain arsitektur Government Hub, pengembangan kapasitas awal ASN (literasi digital dasar). Milestone: Tersusunnya regulasi pendukung, terbentuknya tim kerja, tersedianya desain rinci Government Hub.
- b) Tahun 3-4 (2027-2028): Fase Implementasi dan Adopsi Awal: Pembangunan dan peluncuran Government Hub Versi 1.0 (fokus layanan administrasi dasar dan perizinan), sosialisasi masif publik, implementasi "One Officer One Innovation", pembentukan komunitas inovasi awal. Milestone: Government Hub beroperasi, 70% layanan administrasi dasar terdigitalisasi, 50% ASN berpartisipasi dalam program inovasi.
- c) Tahun 5-6 (2029-2030): Fase Integrasi dan Ekspansi: Integrasi layanan sektoral (kesehatan, pendidikan, pariwisata) ke dalam Government Hub, peluncuran Indeks Desa Inovatif dan program pendampingan, penguatan kerjasama inovasi antar daerah. Milestone: Platform menjadi single-sign-on mayoritas layanan publik, minimal 10 desa percontohan inovatif, terjalin minimal 2 proyek kerjasama antar-daerah.
- d) Tahun 7-8 (2031-2032): Fase Optimisasi dan Ekosistem: Pemanfaatan Big Data Analytics dari Government Hub untuk pengambilan kebijakan berbasis data, pengembangan ekosistem startup lokal melalui inkubator bisnis, integrasi dengan platform nasional (misalnya, INA-Digital). Milestone: Laporan kebijakan pertama berbasis big data diterbitkan, minimal 5 startup lokal berhasil diinkubasi, sistem terintegrasi penuh dengan ekosistem digital nasional.
- e) Tahun 9-10 (2033-2035): Fase Pematangan dan Kepemimpinan (Smart Regency): Implementasi solusi Smart Regency (misalnya: smart environment, smart mobility, smart economy), Sumbawa menjadi rujukan nasional transformasi digital daerah kepulauan, inovasi menjadi budaya tertanam di masyarakat dan pemerintahan. Milestone: Sumbawa diakui sebagai salah satu Smart Regency terdepan di Indonesia, meraih penghargaan inovasi tingkat nasional.

Dengan mengikuti roadmap ini secara konsisten dan adaptif, Sumbawa memiliki peluang besar mengakselerasi pembangunan dan menjadi contoh bagaimana inovasi digital dapat mentransformasi daerah menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Keberhasilan Government Hub Sumbawa akan berdampak transformasional pada budaya pemerintahan menjadi lebih terbuka, responsif, dan akuntabel, serta memperkuat hubungan pemerintah-masyarakat menjadi lebih partisipatif, kolaboratif, dan dilandasi saling percaya. Ini adalah dampak jangka panjang substantif, mencerminkan pergeseran menuju praktik good governance yang lebih matang dan demokratis, menjadi justifikasi utama seluruh investasi dan upaya.

4. KESIMPULAN

Penerapan Government Hub di Kabupaten Sumbawa menunjukkan potensi besar sebagai kerangka integratif yang mampu mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis inovasi. Government Hub tidak hanya berfungsi sebagai alat koordinasi digital antar instansi, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi multipihak yang menciptakan siklus inovasi berkelanjutan. Dalam konteks Sumbawa, pendekatan ini mampu

menjawab berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya digitalisasi desa, serta minimnya sinergi lintas sektoral dan geografis. Dengan memperkuat faktor-faktor eksternal seperti regulasi pro-inovasi, peningkatan kapasitas ASN melalui inisiatif "One Officer One Innovation," serta kolaborasi lintas daerah melalui kerjasama inovasi antar kota/kabupaten, Government Hub dapat berfungsi sebagai pendorong utama daya saing dan pertumbuhan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aichholzer, G., & Allhutter, D. (2016). *E-Government in Europe: A Comparative Study of the European Union Member States*. New York: Springer.
- Bann, C., & Hawkins, R. (1999). *Decision Making and Problem Solving*. New York: Academic Press.
- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(2), 99-110.
- Bayu, B. M. F., & Rosmayudi, A. (2023). Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya. KOORDINASI.
- Cahyani, N. P. K., & Putra, I. P. A. P. (2024). Governance And Digital Transformation: Analisis Ruang Kerja Virtual Melalui Perspektif E-Government Pada Pemerintahan Provinsi Bali. *Public Sphere Review*, 1-11.
- Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dalmia, D., & Alam, F. A. (2021). Evaluasi Program Model Context dan Input dalam Bimbingan Konseling. *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 1(2), 111–124.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Dokumen Universitas Riau. (n.d.). *STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*. Repository University of Riau. Retrieved February 16, 2024, from repository.unri.ac.id
- Erlinnawati, A., & Purwanto, E. (2024). Peran teknologi dan komunikasi dalam manajemen pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(4), 11-11.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Govindarajan, V., & Trimble, C. (2010). *The Other Side of Innovation: Solving the Execution Challenge*. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
- Julianto, A., & Fitriah, A. (2021). Evaluasi Program Ekstrakurikuler Baca Al-Qur'an Di SMP Negeri 03 Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 175–184.
- Keeley, L., Pikkel, R., Quinn, B., & Walters, H. (2013). *Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Laporan Transformasi Digital Nasional 2022*. Jakarta: Kominfo.
- Kurniasih, Y., & Nugroho, J. T. (2022). Inovasi Pemerintah Daerah: Simperda Sebagai Wujud Smart City Di Kota Semarang. *GEMA PUBLICA*, 7(1), 187-196.
- Lagantondo, H., Pandipa, A. K. H., & Thomassawa, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tiwaa. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 54–71.
- Lestari, A. (2023). Digitalisasi Sebagai Kebudayaan Baru Terhadap Pembangunan Pedesaan. *Socio Religia*, 4(2).
- Prakosa, R. M., & Rindiana, I. R. (2023). Analisis Implementasi E-Government Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Digital. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 290-307.
- Putri, A. D. (2021). *Transformasi Digital di Era Pandemi: Studi Kasus di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Nusantara.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., & Laksono, R. D. (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Rahman, F. (2021). *Digitalisasi dan Good Governance*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. (1971). *Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach*. New York: Free Press.

- Sari, R. A. (2021). *Peran Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Scholl, H. J., & Scholl, M. C. (2014). *E-Government: Information, Technology, and the Public Sector*. New York: Routledge.
- Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 99-108.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.
- Sumardjo, I. (2019). *Komunikasi Inovasi* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Tidd, J., & Bessant, J. (2018). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change* (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- United Nations. (2022). *United Nations E-Government Survey 2022*. New York: United Nations.
- Wimmer, M. A., & Tambouris, E. (2016). *E-Government: Research, Applications, and Best Practices*. Berlin: Springer.
- World Bank. (2022). *Digital Progress and Trends Report 2023*. Washington, D.C.: World Bank.
- Zulkarnain, A. (2020). *Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan Transparansi Pemerintahan*. Surabaya: ITS Press.

- Nurrohyani, R. (2020). Pengaruh Pro mosi Cashback pada OVO dan Go-Pay Terhadap Perilaku Konsumen Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas. *Jurnal ilmu ekonomi dan studi pembangunan*, 15.
- Purboyo. (2021). Perilaku konsumen (tinjauan konseptual) dan praktis). Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Putra, E. W. (2016). Pengaruh diskon terhadap minat beli serta dampaknya pada keputusan pembelian (Study pada konsumen yang membeli produk diskon di Matahari Department Store Pasar Besar Malang). *Administrasi bisnis*, 188.
- Putri, F. K. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada pt. Matahari department store di mantos 2. *Jurnal Emba*, 1428-1438.
- Risya, A., & Sihaloho, M. (2020). Pengaruh cashback terhadap keputusan pembelian di marketplace Shopee. *Jurnal Pemasaran Digital*, 9(4), 102-115.
- Sarce, k. (2024). Dampak iklan dan cashback terhadap keputusan pembelian pada e-commerce Shopee Di Kota Surabaya. *Jurnal mahasiswa manajemen dan akuntansi*, 136-151.
- Savitri, C. (2024). Pengaruh flash sale dan diskon terhadap impulsive buying pada produk fashion di shopee. *Journal of management and bussines (jomb)*, 1522.
- Schindler, P. S., & Cooper, D. R. (2014). *Business Research Methods (12th Edition)*. McGraw-Hill Education.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.)*.
- Setyorini, Yiyis Dwi. 2020. "Pengaruh Promosi, Kemudahan Akses, Dan Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Pengguna Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung." *Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*.
- Shihab, M. R. (2023). Pengaruh brand image dan flash sale (penjualan kilat) terhadap keputusan pembelian pada aplikasi tokopedia (survey pada followers tiktok tokopedia 2022). *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 749.
- Shi, S.W dan M. Chen. 2015. Would You Snap Up The Deal? A Study of Consumer Behaviour Under Flash Sale. *International Journal of Market Research* 57(6): 34-45.
- Solomon, M. R. (2017). *Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (12th Edition)*. Pearson Education.
- Sriyanto, A., & Kuncoro, A. W. (2019). Pengaruh brand Ambassador, minat beli dan testimoni terhadap keputusan pembelian. *Jurnal ekonomika dan manajemen*, 8(1), 21-34.
- Sugiyono. (2019) *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Penerbit alfabeta
- Sulikah, s. (2021-2022). Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian bimbingan belajar online ruang guru di sman 1 banyusari karawang. *Jurnal mahasiswa psikologi universitas buana perjuangan karawang* , 80-81.
- Susilana, R. (2015). *Modul Populasi dan Sampel. Modul Praktikum*, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Tarmizi, M. (2020). Pengolahan data menggunakan SPSS dalam penelitian kuantitatif. *Jurnal Metode dan Statistik*, 8(2), 123-134.
- Tybout, A. M., & Calkins, T. (2014). *Kellogg on Marketing*. Wiley.
- Vania, I. (2021). Pengaruh Promo ShopeeFood Terhadap Minat Beli Pengguna Shopee (Di Daerah Tangerang Selatan) Izella Vania1 dan Remista Simbolon. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia*. 46–58.
- Wangi, L. P (2021). Pengaruh flash sale dan cashback terhadap keputusan pengguna shopee. *Jurnal bisnis dan kajian strategi manajemen*, 79-91.
- Wahyuningtias, d. (2014). Uji kesukaan hasil jadi kue brownies menggunakan tepung terigu dan tepung gandum utuh. *Binus business review*, 57-65.
- Yoga Pratama (2020). 25 Grand Theory.

